



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 9/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **dua puluh** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **20:35** WIB, diajukan **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dalam hal ini diwakili oleh **Gede Pasek Suardika (Ketua Umum)** dan **Sri Mulyono (Sekretaris Jenderal)**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 09 Januari 2023 memberi kuasa kepada RIO RAMABASKARA, S.H., M.H

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Selasa** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **11:45** WIB.

**Panitera
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
AP3 Nomor 9/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Pemohon : Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dalam hal ini diwakili oleh Gede Pasek Suardika (Ketua Umum) dan Sri Mulyono (Sekretaris Jenderal)

Pokok Permohonan : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

No APPP : 9/PUU/PAN.MK/AP3/01/2023

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Surat Kuasa	1	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	1	
5	Alat Bukti	1	
6	Permohonan tanggal 20 Januari 2023	12 rangkap	1 Asli, 11 Copy. Renvoi pada nama Kuasa Hukum a.n Samsul seharusnya Syamsul (sesuai KTP, KTA, dan BAS)
7	Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023	12 rangkap	1 Asli, 11 Copy. Renvoi pada nama Kuasa Hukum a.n Samsul seharusnya Syamsul (sesuai KTP, KTA, dan BAS)
8	KTA dan BAS para Kuasa Hukum	1 rangkap	Copy
9	Daftar Alat Bukti tanggal 20 Januari 2023 untuk Bukti P-1 sd P-7	12 rangkap	1 Asli, 11 Copy. Renvoi pada penulisan Bukti P-7
10	Bukti P-1 sd P-7	1 rangkap	Asli. Alat Bukti P-1 akan disusulkan pada saat Perbaikan Permohonan
11	Daftar Alat Bukti bertanggal 20 Januari 2023 untuk bukti P-1 s.d P-9	12 rangkap	1 asli, 11 copy
12	Alat Bukti P-1, P-8 dan P-9	1 rangkap	asli dan leges

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.